

PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROVINSI JAWA BARAT

Ayu Zakya Lestari

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

ayu.zakiales@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to know the effects of local government budget from number of population and human capital ratio to regional economic growth in province of West Java. This research used analysis on panel data estimation. The study results showed that all independent variables in the model can explain the variation of dependent variable, which is regional economic growth in province of West Java for 96,15%. So, throughout the research period, there were policy changes which gave the effect on regional economic growth. It can be seen from dummy variabel of regional autonomy that influences regional economic growth for significant t-value on up to 95%. Then, about local income variable which does not give effect, but the other variables; number of population gives effect and negative for 7,61% and human capital ratio which gives positive effect for 1,95% on regional economic growth.

Keywords: *Economic Growth, Local Income, Population, Human Capital Ratio, Regional Autonomy Policy.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari anggaran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan rasio modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan analisis estimasi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi variabel dependen, yang merupakan pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Jawa Barat sebesar 96,15%. Selama periode penelitian, ada perubahan kebijakan yang memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel dummy otonomi daerah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional untuk signifikan t-nilai pada 95%. Kemudian, variabel pendapatan daerah yang tidak memberikan pengaruh. Sedangkan jumlah penduduk memberikan efek dan negatif untuk sebesar 7,61% dan rasio modal manusia yang memberikan efek positif bagi 1,95% terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan Lokal; Populasi; Rasio Modal Manusia; Kebijakan Otonomi Daerah.*

Diterima: 15 Februari 2013; Direvisi: 15 Maret 2013; Disetujui: 19 Maret 2013

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

Kebijakan otonomi daerah dijalankan pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU No.25/1999 yang disempurnakan dengan UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada waktu ini, Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal pengelolaan pembangunan dan keuangan, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan anggaran di sisi penerimaan dan pengeluaran.

Provinsi Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat. PDRB provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 milyar (US\$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, merupakan angka tertinggi bagi sebuah provinsi. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, PDRB per kapita Jawa Barat adalah Rp. 5.476.034 (US\$644.24) termasuk minyak dan gas. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk minyak dan gas, bahkan lebih baik dari PDB Indonesia secara keseluruhan (http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang bagi provinsi Jawa Barat untuk memiliki kemandirian guna membangun daerahnya. Kemandirian tersebut berpijak pada [1] prinsip demokrasi, [2] partisipasi dan peran serta masyarakat, [3] pemerataan keadilan, serta [4] memperhatikan potensi dan

keaneka ragaman daerah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kebijakan otonomi daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.

Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Keynesianisme atau ekonomi Keynesian atau Teori Keynesian, adalah suatu teori *ekonomi* yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, *John Maynard Keynes*. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi *laissez-faire*, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.

Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi *full employment* (lapangan kerja penuh). Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi *supply-side* yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal. Berdasarkan teori Keynes tersebut, APBD dan APBN merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.

Teori Jumlah Penduduk

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Kedua ahli ekonomi klasik ini berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan

mencapai *stationary state* atau suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Sedangkan menurut ekonom klasik lainnya Adam Smith, yang belum menyadari *law of diminishing returns* (hukum hasil lebih makin berkurang), perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena dapat memperluas pasar. Sedangkan menurut Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan memperbesar pertumbuhan jumlah penduduk hingga menjadi dua kali lipat dalam waktu satu generasi, dan akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima upah yang sangat minim yaitu upah hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistences level*).

Teori Tingkat Pendidikan

Dewasa ini berkembang paling tidak tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial. (Elwin Tobing; Suara Pembaruan; 1994). Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Para pelopornya adalah pemenang hadiah Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, juga pemenang hadiah nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini. Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi.

Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi. Sementara pendidikan untuk rakyat kebanyakan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas yang dominan. Hasilnya, proses pertumbuhan kelas menghambat kontribusi pendidikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini didukung antara lain oleh Samuel Bowles dan Herbert Gintis (1976).

Sedangkan untuk melihat teori yang relevan sesuai dengan keadaan sekarang ini dapat dilihat pada akhir tahun 1980-an dengan pionirnya seperti Paul Romer dan Robert Lucas yang menekankan pada aspek pembangunan modal manusia. Menurut Romer misalnya (1991), modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah satu cara dimana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Karena modal manusia, seperti dikemukakan dalam awal tulisan ini, memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif dan analisis data sekunder. Penelitian ini dilakukan di propinsi Jawa Barat, dengan mengambil sampel wilayah yang terdiri dari tiga kota/ kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, dan Kota Sukabumi dengan pertimbangan PDRB tertinggi, sedang, dan terendah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Buku Jawa Barat dalam Angka, Kabupaten/ Kota dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Barat, dan disamping juga data yang berasal dari sumber-sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*), dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Analisis data panel digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*independent variable*). Pada dasarnya ada tiga teknik untuk meregresi data panel (Baltagi, 2002; Gujarati, 2003; Maddala, 1993; Pindyck dan Rubinfeld, 1998), yaitu: pendekatan OLS biasa (*Pooled Least Square*), pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*), dan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*). Ada 2 tahap dalam memilih metode estimasi dalam data panel. Pertama, membandingkan PLS dengan FEM dengan melakukan uji *F-test*. Jika hasil menunjukkan model PLS yang diterima, maka model PLS yang akan dianalisa. Tapi jika model FEM yang diterima, maka tahap kedua dijalankan, yakni membandingkan dengan model REM. Setelah itu

dilakukan pengujian dengan *Haussman test* untuk menentukan model mana yang akan dipakai, apakah FEM atau REM.

a. PLS vs FEM

Pooled Least Square adalah *restricted model* dimana ia menerapkan *intercept* yang sama untuk seluruh individu. Untuk mengujinya dapat digunakan *restricted F-test*, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model PLS (*Restricted*)

H_1 : Model *Fixed Effect (Unrestricted)*

Dimana *restricted F-test* dirumuskan sebagai berikut :

$$F = \frac{(R^2_{UR} - R^2_R) / m}{(1 - R^2_{UR}) / df}$$

R^2_{UR}	= unrestricted R^2 ; m	= df for numerator (N-1)
R^2_R	= restricted R^2 ; df	= df for denominator (NT-N-k)
N	= Jumlah data cross section; T	= Jumlah data time series
K	= Jumlah Koefisien Variabel	

b. FEM vs REM

Ada beberapa pertimbangan teknis-empiris yang dapat digunakan sebagai panduan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* (ToT untuk Pengajar Ekonomi FEUI, 2006) yaitu : Bila T (jumlah unit *time series*) besar sedangkan N (jumlah unit *cross section*) kecil, maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda. Dalam hal ini pilihan umumnya akan didasarkan pada kenyamanan perhitungan, yaitu FEM. Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka REM harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita menggunakan FEM. Apabila *cross-section error component* (ϵ_i) berkorelasi dengan variabel bebas X maka parameter yang diperoleh dengan REM akan bias sementara parameter yang diperoleh dengan FEM tidak bias. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari REM dapat terpenuhi, maka REM lebih efisien dibandingkan FEM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi Model Data Panel

Pertama-tama dilakukan pengolahan data dengan metode pendekatan *Pooled Least Squares (PLS)*, sebagai salah satu syarat untuk melakukan uji *F-Restricted*. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan metode pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)* untuk dibandingkan dengan metode pendekatan *Pooled Least Square* pada uji *F-Restricted*. Dari hasil pengolahan program *E-Views 6.0* didapatkan hasil seperti tampilan sebagai berikut:

Tabel 1. Regresi Data Panel: PLS dan FEM

	PLS	FEM
R-squared	0.921273	0.961490
Adjusted R-squared	0.915058	0.954889

Sumber: Data diolah

Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka digunakan uji *F-restricted* dengan cara membandingkan F-statistik dan F-tabel. Sebelum membandingkan F-statistik dan F-tabel terlebih dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: H_0 : Model PLS (*Restricted*), H_1 : Model FEM (*Unrestricted*)

Dari hasil diperoleh nilai F-statistik adalah 16,844297, dengan nilai F-tabel pada df (2,35) $\alpha = 5\%$ adalah 3,27, sehingga nilai F statistik > F tabel, maka H_0 ditolak, sehingga model data panel yang dapat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Pendekatan *Random Effect* memiliki syarat bahwa *number of unit cross section > number of coefficient*. Tetapi pada penelitian kali ini, persamaan regresi tidak memenuhi syarat tersebut, dimana *number of unit cross section < number of coefficient* sehingga pendekatan *Random Effect* tidak dapat dilakukan dan model panel tetap pada *Fixed Effect Model*.

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (PAD, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kebijakan otonomi daerah) berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikatnya (pertumbuhan ekonomi regional), yaitu dengan

membandingkan masing-masing nilai t-statistik dari regresi dengan t-tabel dalam menolak atau menerima hipotesis. Pada tingkat kepercayaan $\alpha = 5 \%$, $df = 35$, maka diperoleh t-tabel 2,03.

Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa variabel PAD t-statistiknya lebih kecil dari t-tabel yang berarti H_0 diterima. Bahwa variabel PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. PAD merupakan sumber utama penerimaan suatu daerah. Dengan di berlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka setiap daerah akan berusaha untuk meningkatkan PAD-nya dengan berbagai macam cara. Namun dalam penelitian ini PAD justru tidak memberikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel Poprate, nilai t-statistiknya juga lebih besar dari t-tabel yang berarti H_0 ditolak. Variabel SMAPT mempunyai nilai t-statistik yang lebih besar dari t-tabel yang berarti H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk variabel Dummy Otonomi Daerah t-statistiknya lebih besar dari t-tabel yang berarti H_0 ditolak, maka dummy variabel ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Perubahan kebijakan atau *shock* yang terjadi selama periode penelitian yakni tahun 1995-2008 memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat.

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya, maka digunakan uji F dengan cara membandingkan F-statistik dengan F-tabel. Dari hasil regresi diperoleh nilai F-statistik 145,6435. Pada tingkat kepercayaan $\alpha = 5 \%$, $k=7$, dan $n=42$, maka diperoleh F-tabel 2,22-2,25. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa F-statistik (145,6435) > F-tabel (2,22-2,25), maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas (PAD, Poprate, SMAPT, DOTDA) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya (pertumbuhan ekonomi regional) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Koefisien determinasi adalah sebesar 0,961490. Hal ini terlihat bahwa 96,15 persen pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat dapat di jelaskan oleh PAD, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan, dengan menambahkan dummy variabel otonomi daerah. Sedangkan 3,85 persen variabel pertumbuhan ekonomi regional di jelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Interpretasi Hasil Analisis

Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal sebagai pencerminan dari kesungguhan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi daerah untuk mewujudkan otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang di dukung dengan penguatan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat dapat dilihat dari sisi potensi pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih belum optimal dikarenakan sejumlah kendala, antara lain; belum terdatanya semua obyek dan wajib pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan, namun bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk di suatu daerah merupakan aset dan potensi pembangunan yang besar bila didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan tersedianya lapangan kerja yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk juga berarti angkatan kerja bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran, dan dengan terciptanya pengangguran dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program, serta mobilisasi sumber daya untuk merealisasikan rencana yang telah dibuat. Pendidikan merupakan syarat utama pembangunan kapabilitas dasar manusia. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan modal untuk penggerak pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan di samping sumber daya alam. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dari pengujian hipotesis di atas juga terlihat bahwa dummy kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini kemudian di jelaskan dengan probabilitanya sebesar 0,0102 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dummy kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Tuntutan agar pembangunan tidak hanya berjalan di daerah-daerah yang dekat dengan pemerintahan pusat saja, telah membuat pemerintah mengupayakan strategi yang dapat mewujudkan terciptanya pembangunan. Hal tersebut mendorong lahirnya otonomi daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, propinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu propinsi dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk terbanyak ikut serta mengimplementasikan kebijakan otonomi tersebut.

Otonomi daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, kabupaten/ kota di propinsi Jawa Barat diberi kewenangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya secara leluasa untuk dialokasikan pada sektor-sektor ekonomi yang ada.

Periode Sebelum Otonomi Daerah (1995-2000)

Hasil perhitungan estimasi yang dilakukan terhadap data sebelum adanya kebijakan otonomi daerah. Nilai R^2 dari model pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,988600. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas dalam model mampu menjelaskan variasi pengaruh dari variabel tergantung sebesar 98,86 persen, sedangkan sisanya yaitu 1,14 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai F_{hitung} dari hasil menunjukkan angka sebesar 208,1330 dengan tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 5\%$). Sedangkan nilai F_{tabel} dengan $k=6$ dan $n=18$ adalah 2,66. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis H_0 berada di daerah penolakan, dan H_a diterima. Selama periode sebelum penerapan kebijakan otonomi daerah dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Selama periode sebelum penerapan otonomi daerah, secara individu tidak terdapat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di daerah penelitian. Hal tersebut terlihat dari masing-masing variabel yang tidak signifikan dalam taraf signifikansi 5 persen.

Periode Otonomi Daerah (2001-2008)

Nilai R^2 dari model pertumbuhan ekonomi adalah 0,966203. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas dalam model mampu menjelaskan variasi pengaruh dari variabel tergantung sebesar 96,62 persen. Adapun sisanya yaitu 3,38 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Demikian pula dengan nilai F_{hitung} dari hasil perhitungan menunjukkan sebesar 102,9180 dengan probabilitanya sebesar 0,000000. Adapun F_{tabel} dengan $n=6$; $k=24$ pada $\alpha = 5\%$ adalah 2,51. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 berada di daerah penolakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah penerapan kebijakan otonomi daerah variabel-variabel independen masih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Selama diterapkannya kebijakan otonomi daerah, variabel SMAPT yakni variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat. Tingginya tingkat pendidikan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja, kemudian dapat mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 persen, menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi sebesar 2,426 persen.

Sedangkan variabel *Poprate* atau jumlah penduduk juga memiliki pengaruh yang signifikan namun bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat, dimana setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 5,314 persen. Hal ini terjadi apabila di suatu daerah memiliki populasi yang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya namun tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusianya. Adapun variabel PAD atau pendapatan asli daerah secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari tidak signifikannya nilai t -hitung pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

SIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi potensi pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih belum optimal dikarenakan sejumlah kendala, antara lain; belum

terdapatnya semua obyek dan wajib pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jumlah penduduk menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat apabila jumlah penduduk turun sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 7,61 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk di propinsi Jawa Barat yang pesat, tidak diimbangi dengan kualitas SDM-nya sehingga dapat menjadi beban berat bagi proses pembangunan dan dengan demikian dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Hal ini berarti apabila nilai tingkat pendidikan naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sebesar 1,95 persen.

Kebijakan otonomi daerah sebagai variabel dummy juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Ini berarti selama periode penelitian yakni dari tahun 1995-2008 adanya perubahan kebijakan yakni kebijakan otonomi daerah membawa pengaruh yang signifikan terhadap variasi pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat.

Secara bersama-sama, seluruh variabel kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yang signifikan pada taraf keyakinan hingga 95 persen. Selain itu, variabel independen dalam model juga mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 96,15 persen, sedangkan sisanya yaitu 3,85 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

PUSTAKA ACUAN

Adi, Priyo Hari. 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Jakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Badan Analisis Fiskal Departemen Keuangan. 2004. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta : Kompas.

- Bappenas. 2008. *Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Propinsi Jawa Barat: Bersama Menata Perubahan*. Jakarta : Bappenas.
- Barro, Robert J. 1991. *Economic Growth in a Cross Section of Countries*, *Quarterly Journal of Economic*.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta : Kemitraan.
- Davey, K.J. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press.
- Ehtisham, Ahmad, et.all. 2002. *Intergovernmental Grant System: Application of a General Framework to Indonesia*. IMF Working Paper No. WP/02/128, International Monetary Fund, Washington DC.
- Hirschman, Albert. 1968. *The Strategy of Economic Development*. Connecticut : Yale University Press.
- Isdijoso, Brahmantio dan Wibowo, Tri. 2002. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah, Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta. Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1. Maret, 2002.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*. Jakarta : LP3ES.
- Laboratorium Ilmu Ekonomi FEUI.2006. *Sesi VIII Model Panel*. Depok.
- Mahi, Raksaka. 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
- Muluk, MR. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Nur Naili, Nelly. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 1990-2004*. Jogjakarta.
- Sidik, Machfud, dkk. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Kompas.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Toddaro, Michael P. 1999. *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke-6*. Jakarta : Erlangga.
- Tosun, Mehmet Serkan dan Yilmaz, Serdar. 2008. *Decentralization, Economic Development, and Growth in Turkish Provinces*. The World Bank.
- Udjianto, Didit Welly. 2007. *Kajian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dalam Otonomi Daerah (Studi Kasus 30 Propinsi*

di Indonesia tahun 2000-2004). Buletin Ekonomi, Vol.5 No.1, April 2007.

Winarno, Wing Wahyu. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta : YKPN.

Yustika, Ahmad Erani. 2005. *Perekonomian Indonesia: Deskripsi, Preskripsi, Kebijakan*. Malang : Bayumedia Publishing.